



Perubahan Nomenklatur Kelembagaan Ditarget Rampung 2021

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menargetkan proses pengembalian nomenklatur kelembagaan sejumlah instansi selesai pada awal tahun 2021 mendatang. Saat ini proses penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) masih berlangsung dan tengah masuk dalam tahap evaluasi dari Pemda DIY.

"Sekarang kita masih menunggu hasil evaluasi, setelah itu nanti baru bisa kita siapkan struktur rinci dari kelembagaan yang ada," kata Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya, Rabu (28/1).

Setelah evaluasi berjalan pihaknya akan menurunkan aturan tersebut secara teknis

lewat penerbitan peraturan wali kota (Perwal). Aman menyebut, persiapan dari sisi sumber daya manusia juga tengah dipersiapkan untuk mendukung implementasi dari aturan itu.

Aman juga menjelaskan, adapun fokus

● ke halaman 15

Perubahan Nomenklatur

● Sambungan Hal 9

implementasi pada aturan dan juga perubahan kelembagaan itu nantinya akan mengacu pada tiga hal yakni proses keistimewaan, penyesuaian pedoman pusat dan daerah serta konten yang berkaitan dengan proses bisnis sesuai dengan RJPMD.

"Asumsinya nanti pada perubahan anggaran 2020 ini harapan kita proses perubahan yang berkaitan dengan keistimewaan sudah dapat ditindaklanjuti," ujar dia.

Selain perubahan nomenklatur, Aman mengatakan struktur organisasi dan juga perincian tugas pokok dan fungsi sejumlah pejabat dipastikan juga bakal berubah. Sehingga, pihaknya lebih mempercepat proses perubahan anggaran agar pelaksanaan perubahan itu segera rampung.

"Paling lambat kita targetkan bisa dilaksanakan pada awal 2021 mendatang, paling lambat Januari kemungkinan sudah bisa diterapkan," katanya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyatakan, perubahan nomenklatur kelembagaan diharapkan dapat kian memperkuat identitas keistimewaan di wilayah setempat. Perubahan nama instansi seperti kecamatan menjadi kemandren pun, kata Heroe nantinya juga akan ikut diupayakan lewat kegiatan-kegiatan yang bernuansa keistimewaan.

"Bentuk-bentuk kegiatan-nya mungkin perlu lebih kita perkuat dengan menyesuaikan dari perubahan nomenklatur ini," imbuhnya.

Perkuat Keistimewaan

DPRD Kota Yogyakarta meminta pelaksanaan maupun implementasi perubahan nomenklatur kelembagaan di wilayah setempat mampu memperkuat identitas keistimewaan dan bukan

hanya sebatas formalitas.

Diketahui, saat ini proses perampingan Perda yang bakal menjadi payung hukum perubahan nomenklatur tengah dievaluasi oleh Pemda DIY. Disebutkan pula, dalam aturan itu juga akan disiapkan materi tentang muatan lokal yang lebih disesuaikan dengan kondisi setempat.

"Kami harap pelaksana di tingkatan kampung, kecamatan maupun dinas bisa optimal dan lebih sesuai dengan identitas keistimewaan," kata anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Emanuel Ardi.

Dia mengatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu tahapan evaluasi yang dilakukan dari Pemda DIY, sehingga penyesuaian dan sejumlah persiapan lain dapat dilengkapi pada aturan itu.

"Yang pasti lewat penerbitan Perda ini kami harap pelayanan dan sinergitas antara pemerintah pusat, Pemda dan Pemkot bisa kian maksimal," jelas dia. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Organisasi			

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005